



ANEKA WACANA TENTANG HUKUM

Satjipto Rahardjo

M. Kafrawi

Hermien Hadiati Koeswadji

Sarsintorini Putra

Faiq Bahfen

Endang Kusuma Astuti

Raphaella Diah Imaningrum S

H. Barda Nawawi Arief

Setiawan Nurdayasakti

Abdul Madjid

H. Achmad Sodiki

Moh. Slamet

Peter Mahmud Marzuki

Dewi Astutty Mochtar

Indriati Rini

Lanny Kusumawati

Yuhari Robingu

Umu Hilmy



Tanda Mata 70 Tahun

Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.



ANEKA WACANA TENTANG HUKUM

Tanda Mata 70 Tahun

Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.

Satjipto Rahardjo
M. Kafrawi
Hermien Hadiati Koeswadji
Sarsintorini Putra
Faiq Bahfen
Endang Kusuma Astuti
Raphaella Diah Imaningrum S
H. Barda Nawawi Arief
Setiawan Nurdayasakti
Abdul Madjid
H. Achmad Sodiki
Moh. Slamet
Peter Mahmud Marzuki
Dewi Astutty Mochtar
Indriati Rini
Lanny Kusumawati
Yuhari Robingu
Umu Hilmy

Aneka Wacana tentang Hukum

027897

© Moh. Slamet Cs

Susunan Panitia

- Ketua : Prof. Dr. Abdul Rasjid, S.H., L.L.M.
Wakil Ketua : Dr. Moh. Slamet S.H.
Sekretaris I : Dr. Dewi Astutty Mochtar, S.H., M.S.
Sekretaris II : Dr. Faiq Bahfen, S.H.
Bendahara I : Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.
Bendahara II : Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.S.

ISBN 979-21-0807-6

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Pemegang Copyright.

Dicetak oleh Percetakan Kanisius Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 29 Agustus 2003, Prof. Dr. Abdul Rasjid, S.H., akan menginjak usia 70 tahun, suatu usia yang sangat berarti bagi Pegawai Negeri. Namun demikian, rekan-rekan yang pernah dibimbing beliau pada waktu menyelesaikan studi, yakin bahwa memasuki masa purna tugas, bukan berarti berakhir bagi beliau di bidang pengembangan keilmuan/kegiatan.

Pendalaman beliau di berbagai bidang, baik di bidang Pidana, Hukum Pidana Anak-anak, Hukum Acara Peradilan, Kedokteran, sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas sebagai Promotor.

Ketegasan beliau yang "mencambuk" semangat sisi sangat telaten memberikan masukan, dan selalu menjadi suatu cerminan betapa kepedulian beliau untuk meningkatkan dan mencapai keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan.

Tiada kata-kata yang dapat diungkapkan untuk disampaikan kepada beliau selain dalam wujud buku kenangan ini. Semoga karangan dari mantan anak didiknya ini dapat bermanfaat bagi jawatnya.

Semoga buku ini merupakan kenangan yang berharga dan semangat beliau untuk tetap mengabdikan diri untuk pengetahuan.

Surabaya, 11 Agustus 2003

Ketua Panitia

Prof. Dr. Abdul Rasjid

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 29 Agustus 2003, Profesor Hermien Hadiati Koeswadji, S.H., akan menginjak usia 70 tahun, suatu usia purna tugas bagi seorang Pegawai Negeri. Namun demikian, rekan-rekan kami yang pernah merasakan bimbingan beliau pada waktu menyelesaikan S-2 maupun S-3, berkeyakinan bahwa memasuki masa purna tugas, bukan berarti berakhirnya pengabdian beliau di bidang pengembangan keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Pendalaman beliau di berbagai bidang hukum antara lain Ilmu Hukum Pidana, Hukum Pidana Anak-anak, Hukum Lingkungan Hidup, dan Hukum Kedokteran, sangat bermanfaat dalam pengabdianannya sebagai guru dan sebagai Promotor.

Ketegasan beliau yang "mencambuk" anak didiknya, namun di satu sisi sangat telaten memberikan masukan, pada akhirnya dirasakan sebagai suatu cerminan betapa kepedulian beliau untuk mengantarkan anak didiknya mencapai keberhasilan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Tiada kata-kata yang dapat diungkapkan sebagai tanda terima kasih kepada beliau selain dalam wujud buku kenangan ini yang merupakan himpunan karangan dari mantan anak didiknya, maupun dari rekan-rekan sejawatnya.

Semoga buku ini merupakan kenangan manis dan lebih menggelorakan semangat beliau untuk tetap mengabdikan kepada dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Surabaya, 11 Agustus 2003
Ketua Panitia

Prof. Dr. Abdul Rasjid S.H., L.L.M.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	v
Daftar isi	vii
ARTIKEL	
SEDIKIT TENTANG ILMU HUKUM SEBAGAI SEBENAR ILMU, oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.	1
HUKUM, ILMU HUKUM & PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA, oleh Prof. Dr. M. Kafrawi, S.H.	5
ETIK DAN HUKUM DALAM MENEJEMEN SISTEM KESEHATAN, oleh Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.	22
DILEMA AKSES PELAYANAN ABORSI YANG AMAN, Prof. Dr. Sarsintorini Putra, S.H., M.H.	30
ASPEK LEGAL LAYANAN FARMASI KOMUNITAS DENGAN KONSEP PHARMACEUTICAL CARE, oleh Dr. Faiq Bahfen, S.H.	45
ETIK DAN HUKUM DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT, oleh Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.	61
TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM UPAYA PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN, oleh Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M Hum.	77
THE PATIENT'S RIGHT TO INFORMED CONSENT, by Raphaella Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.S.	100
	vii

POKOK-POKOK PEMIKIRAN (IDE DASAR) ASAS-ASAS HUKUM PIDANA NASIONAL, oleh Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.	107
REGULASI NON -DEROGABLE RIGHTS DALAM HUKUM POSITIP DAN IMPLIKASINYA PADA KEBERADAAN PIDANA MATI, oleh Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.	120
KEKERASAN PUBLIK TERHADAP ORANG YANG DIDUGA SEBAGAI DUKUN SANTET DI DAERAH MALANG SELATAN, oleh Abdul Madjid, S.H., M. Hum.	129
KEBIJAKAN SUMBERDAYA ALAM DAN IMPLIKASI JURIDISNYA PASCA TAP MPR No. IX/MPR/2001 DAN KEPRES No. 34 TAHUN 2003, oleh Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H.	143
DINAMIKA KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG BERASPEK PIDANA DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, oleh Dr. Moh. Slamet, S.H.	157
PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA SEDANG BERKEMBANG DAN ALIH TEKNOLOGI, oleh Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.L.M.	174
PERPEKTIF HUKUM TERHADAP SISTEM PEREKONOMIAN, oleh Dr. Dewi Astutty Mochtar, S.H., M.S.	197
PEMBERDAYAAN POLRI DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, oleh Prof. Dr.Indriati Rini, S.H., M.S.	214
FUNGSI NOTARIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA, oleh Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.S.	222
PENDAYAGUNAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI DAERAH DALAM UPAYA MELAKSANAKAN OTONOMI YANG LUAS, NYATA DAN BERTANGGUNGJAWAB, oleh Yuhari Robingu, S.H., M.S.	245
PENTINGNYA MEKANISME INTERNASIONAL UNTUK MELINDUNGI BURUH MIGRAN INDONESIA SETELAH UN CONVENTION ON THE PROTECTION OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR FAMILIES TELAH DIRATIFIKASI OLEH 20 NEGARA, oleh Umu Hilmy, S.H., M.S.	258

THE PATIENT'S RIGHT TO INFORMED CONSENT

By: *Raphaella Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.S.**

In 1984 there was a case in Sukabumi, West Java, a patient sued a physician cause the physician didn't give him adequate information about the blind risk of the operation of patient's eye. In the patient's opinion, if he knew the risk, he won't permit the physician to perform the operation. While in physician's opinion, just the operation was held to prevent contagious sickness to the other eye.

Still there was another case. Bongguk Kendy, a boxer in emergency situation, wasn't given a prompt help because the physician was still waiting for the patient's family consent.

Once mass media exposed a case about a patient, Hartono, who he lost his penis because of the operation held by physician without his consent, and without adequate information about purpose and benefit of the operation. The signatory of the form of Informed Consent is his son, when the patient is capable to make consent according to the law.

In our daily life we often hear about patients who step out from the physician's room without knowing what happens to them.

Some of the above examples indicate that people as well as physician still don't realize the importance of the right of patient to informed consent. The right of a patient to autonomous choice is widely recognized in medical practice, but its meaning and practical implication remain uncertain

It is widely believe that the physician has a moral obligation to make it possible for patients to decide important matters that affect their health. However, the ability to "make a decision" is largely dependent upon the information available to the patient. A patient's consent to a medical procedure would be insignificant in the absence of relevant information. For example, suppose it is believe but not well confirmed that a patient has cancer. If this patient is asked to submit to dangerous exploratory surgery, it may be of fundamental importance that he or she understand that cancer is deadly before consenting to the surgery. If the patient is only informed that exploratory surgery is needed, a piece of true but incomplete information has been provided. Unless additional information is supplied, the consent will be probably invalid from moral a view standpoint. Hence, it is often said that before a physician performs a medical procedure on a competent patient, he or she has an obligation to obtain the patient's voluntary informed consent. This writing is focused in the right of patient to information and the right to consent, from ethical aspect as well as law.

The Ethical and Legal Basis

Informed Consent or *Persetujuan Berdasarkan Informasi* or *Persetujuan Berdasar Medik* is the right of patient to get complete and true information, about his or her health from the physician. This concept was originated from the autonomy ethical principle or respect of person. This right most recently asserted as fundamental right to be told the truth and the right to receive adequate information so that a responsible decision may be made. This principle contains of two sub-principles: First, every person has the right to decide freely what will he choose based on his adequate understanding; Second, the decision must be made in the situation which enables patient or her to make a choice without intervention or force. Because every person is autonomous, then he needs information to make considerations so that he can make the choice according to the considerations. The person who doesn't autonomous or lack of autonomous, has the right to be protected. In ethical term, this autonomy principle is called as "umbrella concept", because other major ethical principles such as beneficence, non-ma-

* The Writer is a lecturer at Faculty of Law of Widya Karya Catholic University, Malang

leficence, confidentiality, and veracity, are assumed originated from the autonomy principle.

The autonomy principle then was broken down into the Code of Medical Ethics. In Indonesia, this can be found in article 9 which states: Health surgery is held, there must be a consent from the patient or his family. For PB IDI Nomor 319/PB/A/4/88 about Informed Consent stipulates: Adult and mentally health person has the right to decide what will be done to his body. Physician has no right to do medical action which is in conflict with the patient's will, although the action is intended for the benefit of the patient.

In legal term, the principle is clarified and sharpened by the issuing of Minister of Health Law Regulation Number 585/Per/Men.Kes/IX/1987 (Peretujuan Tindakan Medik (Informed Consent) and Law Number 23/1992 on Health. By the issuing of the regulation, then the right of patient to informed consent which previously ethically bound now has been strengthened because it has been the substance of law and legally bound.

The Information

The most important element of Informed consent is disclosure of informed consent. Often by signing the form of informed consent, the patient or physician feel free from liability. They may assume that any risk has been approved by consenting or signing the form of operation. What there must be information before the consent. Information can be explanation, education, or guidance to the patient.

Standards of disclosure in informed consent context can be varies to standard are not at present well articulated in either biomedical ethics or case law, and much of informed consent focuses on this problem.

The first standard is Professional Practice Standard (Beauchamp, 1982). This standard holds that adequate disclosure is determined by the customary rules or traditional practices of a professional community - e.g., a community of physicians, psychologists, or anthropologists. The custom in a profession establishes both the topics to be discussed and the amount and type of information to be disclosed about each topic. However may problem

and this professional practice standard for disclosure. First, it is unclear if there even exist a customary standard of disclosure for a particular profession within the medical profession. How much consensus - and within each of the field of medicine - is necessary to establish that a professional standard for disclosure does in fact, exist? Second, if custom alone is as conclusive, then pervasively negligent care can be perpetuated in impunity, for relevant professionals will jointly offer the same inferior information and precautions. Finally, a third and principal objection to the standard is that this standard undermines patient autonomy, the promotion of which many hold to be primary function and justification of informed consent requirements. If the standard is followed, then paternalistic model is implemented, that physician is treated as the person who has known most about the patient. The result of the paternalistic model is, giving separate information is being the part of physician's policy who knows best about treatment for the patient.

The second standard is the reasonable person standard. Approximately 25 percent of legal jurisdictions in the United States now accept this critique (Beauchamp, 1982). According the standard, information to be disclosed is determined by reference to a hypothetical reasonable person, and the materiality of a piece of information is measured by the significance a reasonable person would attach to a risk in deciding whether to submit to a procedure. Most proponents of the reasonable standard believe that considerations of autonomy generally outweigh those of beneficence and that the reasonable standard better serves the individual than does the professional standard.

Unfortunately, this standard has difficulties. Application of the abstract reasonable person standard to a concrete case would require reference to specific facts of the case, a pressing conceptual puzzle is how to understand what information the reasonable person would want "under the same or similar circumstances" as those of the patient.

The third standard is subjective standard. *Canterbury case (Canterbury v. Spence (464 F.2a 772, 1972))* was the first and most influential of such informed consent cases. The case involved a form of surgery on the back (*laminectomy*) that led to unexpected paralysis, the possibility which

had not been disclosed. Judge Spottswood Robinson's opinion focuses on the right to self-determination: "The root premise is the concept, fundamental in American jurisprudence that every human being of adult years and sound mind has a right to determine what shall be done with his or her body..." (Beauchamp, 1982). The specific focus in Canterbury and subsequent cases has been on the development of an adequate standard of adequate disclosure. The third standard focuses on individual informational needs. Patients may have highly personal or unorthodox beliefs, unique health problems, or a unique family history that require a different informational base that that required by most persons.

In Indonesia, how far is the disclosure of information needed? According to Regulation of Minister of Health Law; the information must be complete and true. Information also includes benefit and risk of the medical treatment, both diagnostics or therapeutic. Information also include the need of medical action and the possible risk.

The regulation stipulates exceptions. Physician may not give information when it will make the condition of patient getting worse. It means the risk is thus material when a reasonable person, in what the physician knows or should know to be the patient's position, would be likely to attach significance to the risk or cluster of risks in deciding whether or not to forgo the proposed therapy.

The topics importantly demanding a communication of information are the inherent and potential hazard of the proposed treatment, the alternatives to that treatment, if any, and the results likely of the patient remaining untreated. The actors contributing significance to the dangerous of a medical technique are, of course, the incidence of injury and the degree of harm threatened. The disclosure doctrine, like others marking lines between permissible an impermissible behavior in medical practice, is in essence a requirement of conduct prudent under the circumstances.

Two exceptions to general rule of disclosure need to be noted. Each in the nature of a physician's privilege not to disclose, and the reasons underlying them is appealing. Each, indeed is but a recognition that as important as is the patient's right to know. It is greatly outweighed by the magnitudious circumstances giving rise to the privilege. The first rule

may play when the patient is unconscious or otherwise incapable of consenting, and harm from a failure to treat is imminent and outweighs any harm threatened by the proposed treatment. When a genuine emergency of such sort arises, it is settled that impracticality of conferring with the patient excuses with need for it. Even in situations of that character the physician should, as current law requires, attempt to secure a relative's consent if possible. But if time is too short to accommodate discussion obviously the physician should proceed with the treatment.

The second exception obtains when risk-disclosure poses such a threat of harm to the patient as to become unfeasible or contraindicated from a practical point of view. It is recognized that patients occasionally become so emotionally distraught on disclosure as to foreclose a rational decision or complicate or hinder the treatment, or perhaps even pose psychodamage to the patient. Where that is so, the cases have generally held that the physician is armed with a privilege to keep the information from the patient, and we think it clear that portents of that type may justify a physician in action he deems medically warranted. The critical inquiry is whether the physician responded to a sound medical judgement that communication of the risk information would present a threat to the patient's well-being.

Parent

This element actually is only the consequence or following action after getting adequate information. The consent can be made written or orally. The most important thing is, the adult years (has been 21 years old or more) and sound mind, and mentally retarded, must give his own consent. For patient in emergency situation, children, and mentally retarded, the consent must be held by the parent or curator.

It need not consent when the patient is in unconscious condition or lack of accompany with his family and medically under emergency situation which need soon medical treatment for the sake of himself.

Trustful Relationship

From the above explanation, it can be concluded that "informed consent" has two main functions: First, supporting cooperative relationship between physician and patient. Second, informed consent can protect physician from suing when rising side effect which doesn't to do with physician's negligence.

If the informed consent can be implemented well, then the trustful relationship won't only be stated in ethical code, but also expressed in the physician-patient humanistic relationship, which respect patient as "person" whom her/his right must be respected.

References:

- Beauchamp Tom L. and LeRoy Walters, *Contemporary Issues in Bioethics* 1982. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.
- Charles Culver and Bernard Gert, "Valid Consent" in *Beauchamp Contemporary Issues in Bioethics* 1982. Wadsworth Publishing Company, Belmont California.
- Kerbala, Husein. 1993 *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*. Bandung, Sinar Harapan
- R. Diah Imaningrum Susanti, Hak Pasien atas Persetujuan Tindakan Medis. *Kompas*, 22 November 1997.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis atau Informed Consent
- Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

ISI-POKOK PEMIKIRAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Oleh: Prof. Dr. H. Barda Nawar

1. Mengkaji Asas-asas Hukum Pidana N...
...tidak dapat dilepaskan dari kajian...
...ide dasar atau wawasan/p...
...melalui belakangnya. Oleh karena...
...didukung/disertai dengan kajian/dis...
2. Kajian konseptual mengenai ide-ide...
...um Pidana (Materiel) Nasional me...
...yang panjang dan sudah cukup lama...
...masi". Hasil kajian itu kemudian dicob...
...mentasikan, dan diformulasikan dal...
3. Untuk bahan diskusi, ada baiknya d...
...view/reorientasi/re-evaluasi dan refe...
...kiran atau ide dasar di dalam konsep...

Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Dalam

1. Penyusunan konsep didasarkan pad...
...antara lain sebagai berikut:
 - a. KUHP hanya merupakan suatu...
...pidanaaan' (*sentencing system*)...
...sistem penegakan hukum pida...
...sejak awal bahwa upaya pemba...
...nesia tidak dapat dilakukan ha...